

PENGELOLAAN KONFLIK DAN KOLABORASI DI PERBATASAN LAUT : PERSPEKTIF INDONESIA TERHADAP KETEGANGAN DAN KESEPAKATAN MARITIM DENGAN CHINA

Samsul Bahri Wahidun¹, Edy Sulistyadi², Buddy Suseto³

¹²³Universitas Pertahanan Republik Indonesia

samsulnavy45@gmail.com

ABSTRACT

Tensions at Indonesia's maritime border have escalated in October 2024 after a China Coast Guard (CCG) vessel entered Indonesia's jurisdiction, disrupting oil and gas exploration activities by PT Pertamina East Natuna. Indonesia responded with firm measures, including Bakamla patrols and diplomatic protests based on UNCLOS 1982. On the other hand, in November 2024, the two countries signed a Memorandum of Understanding (MoU) for joint maritime development as an effort to ease tensions while creating strategic economic opportunities. The purpose of this journal is to analyse conflict management and collaboration in the North Natuna Sea border between Indonesia and China. The results show that conflict management requires a balance between a realist approach to defend sovereignty and a liberal institutionalism approach to capitalise on opportunities for cooperation. Thus, recommendations are given to increase defence capacity, align cross-sector policies and strengthen bilateral and regional relations to create stability in the North Natuna Sea region.

Keywords: Border, Indonesia, Tension, Agreement, China

ABSTRAK

Ketegangan di perbatasan wilayah maritime Indonesia telah meningkat pada bulan Oktober 2024 setelah kapal *China Coast Guard* (CCG) memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia, akibat dari adanya kapal tersebut dapat mengganggu aktivitas eksplorasi minyak dan gas oleh PT Pertamina East Natuna. Indonesia merespons dengan langkah tegas, termasuk patroli Bakamla dan protes diplomatik berbasis UNCLOS 1982. Di sisi lain pada bulan November 2024, kedua negara menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk pengembangan maritim bersama sebagai upaya meredakan ketegangan sekaligus menciptakan peluang ekonomi strategis. Adapun penulisan jurnal ini untuk menganalisa pengelolaan konflik dan kolaborasi di perbatasan Laut Natuna Utara antara Indonesia dengan China. Hasil penulisan jurnal menunjukkan bahwa pengelolaan konflik memerlukan keseimbangan antara pendekatan realisme untuk mempertahankan kedaulatan dan pendekatan liberal institusionalisme untuk memanfaatkan peluang kerja sama. Sehingga dengan demikian rekomendasi diberikan untuk meningkatkan kapasitas pertahanan, menyelaraskan kebijakan lintas sector dan memperkuat hubungan bilateral serta regional guna menciptakan stabilitas di kawasan Laut Natuna Utara.

Kata Kunci : Perbatasan, Indonesia, Ketegangan, Kesepakatan, China

PENDAHULUAN

Hubungan antara Indonesia dengan China dalam konteks maritim memiliki dinamika yang kompleks, terutama di wilayah Laut Natuna Utara. Ketegangan sering kali muncul akibat klaim wilayah yang tumpang tindih dan aktivitas di perairan yang disengketakan. Laut Natuna Utara merupakan salah satu wilayah strategis karena memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan menjadi jalur pelayaran internasional yang penting (Laksamana, 2023). Keberadaan kapal penjaga pantai China (*China Coast Guard*) di perairan ini pada Oktober 2024 menggambarkan adanya ancaman terhadap kedaulatan Indonesia, yang direspons dengan langkah tegas oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI untuk menjaga yurisdiksi nasional (Mongabay, 2024).

Di sisi lain, hubungan diplomatik antara Indonesia dengan China tidak hanya diwarnai oleh konflik, tetapi juga oleh kolaborasi strategis. Pada bulan November 2024, kedua negara menandatangani nota kesepahaman untuk "pengembangan maritim bersama," yang bertujuan untuk memanfaatkan potensi perairan yang diklaim bersama (Kementerian Luar Negeri RI, 2024). Kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam meredakan ketegangan, meskipun menuai kritik dari sejumlah pihak yang mengkhawatirkan dampaknya terhadap posisi Indonesia dalam sengketa di Laut China Selatan (Simorangkir, 2024).

Ketegangan dan kolaborasi ini mencerminkan dilema yang dihadapi Indonesia dalam mengelola wilayah perbatasannya. Sebagai negara maritim, Indonesia tidak hanya dituntut untuk menjaga kedaulatan tetapi juga mampu memanfaatkan peluang kerja sama internasional untuk mendukung kepentingan nasional (Effendi, 2022). Dalam hal ini pendekatan diplomasi yang seimbang menjadi kunci utama untuk menyelesaikan konflik tanpa mengorbankan hubungan bilateral yang strategis.

TINJAUAN LITERATUR

Penulisan jurnal tentang pengelolaan konflik maritim dan kolaborasi internasional di Laut Natuna Utara menjadi relevan dengan adanya insiden kapal *China Coast Guard* (CCG) 5402 yang memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia pada bulan Oktober 2024. Menurut Effendi (2022) konflik maritim sering kali berkaitan dengan klaim wilayah tumpang tindih dan kepentingan strategis dari negara-negara yang terlibat. Dalam konteks ini, respons militer dan diplomasi yang dilakukan Indonesia mencerminkan upaya untuk melindungi kedaulatan dan stabilitas ekonomi di wilayah tersebut. Keberadaan Bakamla RI sebagai penjaga utama yurisdiksi menunjukkan langkah konkret untuk menyeimbangkan pendekatan militer dan diplomatik dalam mengelola konflik.

Teori realisme memberikan kerangka analitis yang kuat untuk memahami langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia dalam konflik ini. Strategi diplomasi

yang dilakukan melalui UNCLOS 1982, misalnya, menegaskan hak Indonesia atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sekaligus memberikan tekanan kepada China untuk menghormati batas wilayah tersebut (Effendi, 2022). Sebaliknya, nota kesepahaman maritim yang ditandatangani pada bulan November 2024 mencerminkan dimensi liberal institusionalisme, di mana kerja sama bilateral menjadi alat untuk meredakan ketegangan dan menciptakan peluang ekonomi baru (Simorangkir, 2024).

Namun, terdapat tantangan signifikan dalam pengelolaan konflik dan kolaborasi di Laut Natuna Utara. Di tingkat domestik, keterbatasan infrastruktur dan koordinasi antarinstansi menjadi kendala utama yang dapat menghambat efektivitas pengelolaan konflik. Sementara itu, tekanan geopolitik dari kekuatan besar seperti China dan Amerika Serikat menciptakan dilema strategis bagi Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara mempertahankan kedaulatan dan memanfaatkan kerja sama internasional (Laksamana, 2023). Tantangan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang komprehensif, mencakup peningkatan kapasitas institusi domestik dan strategi diplomasi yang adaptif di tingkat internasional.

Pada akhirnya, pengelolaan konflik dan kolaborasi di Laut Natuna Utara memberikan implikasi penting bagi kebijakan pertahanan dan diplomasi maritim Indonesia. Penyelarasan kebijakan lintas sektor dan investasi dalam infrastruktur maritim menjadi langkah penting untuk meningkatkan keamanan wilayah. Selain itu, advokasi di forum internasional seperti ASEAN dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tekanan eksternal. Dengan memastikan transparansi dalam kerja sama dengan China, Indonesia dapat memanfaatkan hubungan bilateral untuk menciptakan stabilitas kawasan sekaligus mempertahankan kepentingan nasional (Effendi, 2022; Simorangkir, 2024).

METODOLOGI PENULISAN

Penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisa strategi pengelolaan konflik dan kolaborasi di perbatasan Laut Natuna Utara antara Indonesia dengan China. Pendekatan ini relevan karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap dinamika hubungan bilateral yang melibatkan aspek militer, diplomasi dan kebijakan internasional. Perspektif teori realisme digunakan untuk memahami langkah-langkah Indonesia dalam menjaga kedaulatan melalui patroli maritim dan diplomasi berbasis hukum internasional (Effendi, 2022). Selain itu, teori liberal institusionalisme membantu menjelaskan upaya kolaboratif melalui nota kesepahaman sebagai sarana meredakan ketegangan dan mendorong stabilitas kawasan (Simorangkir, 2024).

Data utama diperoleh dari dokumen resmi, seperti laporan Badan Keamanan Laut (Bakamla), nota kesepahaman pengembangan maritim Indonesia-China, dan kebijakan terkait pengelolaan wilayah perbatasan. Kajian literatur juga digunakan

untuk memperkaya perspektif analitis, dengan merujuk pada penulisan jurnal sebelumnya mengenai keamanan maritim, resolusi konflik dan diplomasi internasional (Laksamana, 2023). Analisis mendalam terhadap tantangan domestik dan internasional, seperti keterbatasan infrastruktur, koordinasi antarinstansi dan tekanan geopolitik, turut diintegrasikan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pengelolaan konflik dan kolaborasi. Teknik analisis data melibatkan langkah-langkah reduksi data, kategorisasi tema dan interpretasi mendalam berdasarkan hubungan antara teori dan temuan penulisan jurnal (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Proses analisis ini mencakup identifikasi tindakan Indonesia dalam meningkatkan kapasitas Bakamla RI untuk menjaga keamanan wilayah perbatasan, serta strategi diplomasi yang dilakukan di forum internasional seperti ASEAN untuk memperkuat posisi Indonesia.

Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman holistik mengenai strategi Indonesia dalam mengelola konflik dengan tetap memanfaatkan peluang kolaborasi. Sehingga dengan menggabungkan perspektif realisme dan liberal institusionalisme, penulisan jurnal ini dapat memberikan wawasan secara teoretis dan praktis yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam menjaga kedaulatan wilayah sekaligus membangun hubungan strategis di kawasan Laut Natuna Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Ketegangan di Laut Natuna Utara

Pada bulan Oktober 2024, ketegangan di Laut Natuna Utara meningkat setelah kapal *China Coast Guard* (CCG) 5402 memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia. Kapal tersebut dilaporkan mengganggu aktivitas survei seismik yang dilakukan oleh MV *Geo Coral*, yang merupakan bagian dari eksplorasi minyak dan gas oleh PT Pertamina East Natuna. Insiden ini memicu protes diplomatik dari Indonesia, mengingat pelanggaran tersebut terjadi di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang diakui berdasarkan UNCLOS 1982. Ancaman ini berdampak langsung pada keamanan dan stabilitas ekonomi di wilayah tersebut, terutama karena Laut Natuna Utara adalah area strategis untuk eksplorasi sumber daya dan jalur pelayaran internasional (Mongabay, 2024). Sehingga dengan adanya Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI berhasil mengusir kapal CCG 5402, hal ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam menjaga kedaulatannya.

Nota Kesepahaman (MoU) Pengembangan Maritim Bersama dengan China

Pada bulan November 2024, Indonesia dengan China menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang pengembangan maritim bersama. Kesepakatan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama bilateral di sektor maritim, terutama di wilayah-wilayah dengan potensi klaim tumpang tindih. MoU yang dilakukan

mencakup pengembangan infrastruktur pelabuhan dan eksplorasi potensi perikanan di area yang disepakati. Akan tetapi kerja sama ini menuai kritik dari sejumlah pihak di dalam negeri, yang khawatir bahwa kesepakatan ini dapat digunakan oleh China untuk memperkuat klaimnya di Laut Natuna Utara, yang masih menjadi bagian dari Laut China Selatan yang disengketakan (Simorangkir, 2024). Meskipun demikian, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kesepakatan ini tidak mempengaruhi posisi hukum Indonesia terkait kedaulatan wilayah.

Pendekatan Diplomasi Indonesia dalam Pengelolaan Konflik

Indonesia telah mengadopsi strategi diplomasi bilateral untuk meredakan ketegangan dan membangun kolaborasi dengan China. Melalui dialog langsung, Indonesia berusaha menegaskan hak-haknya berdasarkan UNCLOS 1982 sembari menawarkan kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam forum internasional seperti ASEAN untuk mendapatkan dukungan regional dalam menjaga stabilitas di Laut Natuna Utara. Pendekatan ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk memanfaatkan hukum internasional sebagai dasar dalam mengelola konflik maritim. Keberadaan ASEAN dan UNCLOS membantu memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik yang kompleks (Effendi, 2022).

Analisa Konflik Maritim Berdasarkan Teori Realisme

Pendekatan Indonesia dalam mengelola ketegangan di Laut Natuna Utara mencerminkan prinsip utama teori realisme, yaitu perlindungan kedaulatan dan keamanan nasional sebagai prioritas utama. Langkah-langkah militer, seperti peningkatan patroli Bakamla RI, menunjukkan respons tegas terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh kapal China Coast Guard. Di sisi lain, diplomasi juga tetap menjadi strategi penting untuk memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi tanpa memicu eskalasi konflik. Adapun Indonesia juga menggunakan kerangka hukum internasional seperti UNCLOS 1982 untuk memperkuat klaimnya dan mendesak China agar menghormati batas ZEE Indonesia (Effendi, 2022). Strategi ini menunjukkan keseimbangan antara pendekatan keras dan lunak dalam melindungi kedaulatan.

Kolaborasi Maritim dalam Perspektif Liberal Institusionalisme

Dalam konteks kerja sama maritim, nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Indonesia dengan China pada bulan November 2024 menjadi contoh nyata dari pendekatan liberal institusionalisme. Kerja sama ini bertujuan untuk meredakan ketegangan dan menciptakan keuntungan bersama melalui pengembangan maritim yang berkelanjutan. Liberal institusionalisme menekankan pentingnya interaksi diplomatik untuk menciptakan stabilitas, termasuk melalui pembangunan

infrastruktur pelabuhan dan pengelolaan sumber daya perikanan. Namun, keberhasilan kerja sama ini sangat bergantung pada komitmen kedua pihak untuk menjunjung transparansi dan menghormati batas yurisdiksi yang telah diakui secara internasional (Simorangkir, 2024).

Tantangan dalam Mengelola Konflik dan Kolaborasi

Tantangan domestik yang dihadapi Indonesia meliputi keterbatasan infrastruktur maritim, kurangnya koordinasi antarinstansi dan minimnya dukungan masyarakat lokal terhadap program-program pemerintah di wilayah perbatasan. Selain itu, tantangan internasional juga cukup signifikan, terutama karena tekanan geopolitik dari kekuatan besar seperti China dan Amerika Serikat yang bersaing di kawasan Laut China Selatan. Dinamika ini menciptakan dilema bagi Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara mempertahankan kedaulatan dan membangun hubungan bilateral yang strategis (Laksamana, 2023). Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif yang mampu mengatasi tantangan-tantangan ini secara holistik.

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Implikasi dari dinamika ini terhadap kebijakan pertahanan dan diplomasi maritim Indonesia cukup signifikan. Pemerintah perlu meningkatkan patroli maritim dan kapasitas Bakamla RI untuk menjaga keamanan di Laut Natuna Utara. Selain itu, penyelarasan kebijakan lintas sektor dan advokasi di forum internasional, seperti ASEAN, dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tekanan eksternal. Transparansi dalam kerja sama dengan China juga menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa kepentingan nasional tetap terjaga. Dengan memperkuat diplomasi maritim dan meningkatkan investasi dalam infrastruktur serta sumber daya manusia, Indonesia dapat lebih efektif dalam mengelola konflik sekaligus memanfaatkan peluang kolaborasi (Effendi, 2022; Simorangkir, 2024).

Adapun pengelolaan konflik dan kolaborasi di Laut Natuna Utara merupakan upaya strategis untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia sekaligus menciptakan stabilitas di kawasan yang memiliki nilai strategis tinggi. Langkah ini mencakup pendekatan diplomasi yang kuat, penguatan kapasitas pertahanan, serta kerja sama bilateral dan multilateral. Untuk memastikan keberhasilan strategi tersebut, diperlukan sinergi lintas sektor yang melibatkan institusi pertahanan, pemerintah, akademisi dan sektor swasta. Adapun langkah – langkah strategis yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat kehadiran operasional di Laut Natuna Utara dengan mengerahkan kapal perang dan sistem pengawasan berbasis satelit.
2. Mengadakan latihan gabungan dengan negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kemampuan operasional dan memperkuat solidaritas kawasan.

3. Meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal melalui program pemberdayaan berbasis maritim, seperti pelatihan pertahanan maritim dan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.
 - a. Meningkatkan kapasitas patroli maritim dengan menggunakan teknologi canggih, seperti drone dan radar pengawasan.
 - b. Mengadakan pelatihan reguler bagi personel untuk menghadapi situasi konflik maritim dan mengelola insiden dengan pendekatan hukum internasional.
 - c. Merumuskan kebijakan yang memperkuat sinergi antara kementerian, Bakamla dan institusi terkait dalam pengelolaan konflik maritim.
 - d. Mengalokasikan anggaran khusus untuk pengadaan infrastruktur maritim di wilayah Laut Natuna Utara, seperti pelabuhan dan pusat pengawasan.
 - e. Melakukan penulisan jurnal berbasis bukti untuk mengevaluasi dampak konflik dan kolaborasi terhadap hubungan bilateral Indonesia-China.
 - f. Menyediakan rekomendasi berbasis data untuk mengatasi tantangan dalam implementasi kerja sama maritim dan mempertahankan kedaulatan wilayah.

KESIMPULAN

Ketegangan di Laut Natuna Utara yang dipicu oleh masuknya kapal *China Coast Guard* pada bulan Oktober 2024 menyoroti pentingnya pengelolaan konflik maritim yang strategis oleh Indonesia. Respons tegas melalui patroli Bakamla RI dan protes diplomatik menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya, terutama di kawasan yang memiliki nilai strategis tinggi untuk eksplorasi sumber daya alam dan pelayaran internasional. Insiden ini juga menggambarkan dinamika yang kompleks di wilayah perbatasan laut, di mana ancaman terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan memerlukan langkah-langkah nyata berbasis hukum internasional, seperti UNCLOS 1982.

Di sisi lain, kolaborasi maritim melalui Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada bulan November 2024 menjadi bentuk pendekatan diplomasi bilateral yang bertujuan meredakan ketegangan dan menciptakan peluang kerja sama strategis. MoU ini mencerminkan pendekatan liberal institusionalisme, di mana kerja sama internasional dapat menjadi alat untuk menciptakan stabilitas dan manfaat bersama. Namun, transparansi dan penghormatan terhadap batas yurisdiksi tetap menjadi elemen penting untuk memastikan kerja sama ini tidak mengurangi posisi hukum Indonesia terkait kedaulatan.

Tantangan dalam mengelola konflik dan kolaborasi ini mencakup masalah domestik, seperti keterbatasan infrastruktur dan koordinasi antarinstansi, serta tekanan geopolitik dari kekuatan besar di kawasan Laut China Selatan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk meningkatkan kapasitas pertahanan dan diplomasi maritim Indonesia. Advokasi di forum internasional,

seperti ASEAN, juga memainkan peran penting dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan geopolitik yang semakin kompleks.

Sehingga pengelolaan konflik dan kolaborasi di Laut Natuna Utara memerlukan keseimbangan antara pendekatan realisme untuk melindungi kedaulatan dan pendekatan liberal institusionalisme untuk memanfaatkan peluang kerja sama. Dengan memperkuat patroli maritim, menyelaraskan kebijakan lintas sektor dan membangun hubungan internasional yang strategis, Indonesia dapat menjaga kedaulatannya sambil menciptakan stabilitas di kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, D. (2022). *Diplomasi Maritim Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Luar Negeri RI. (2024). Nota Kesepahaman Pengembangan Maritim Bersama Indonesia-China. *Laporan Resmi Kemenlu RI*.
- Laksamana, M. (2023). Laut Natuna Utara: Potensi, Sengketa, dan Tantangan Geopolitik. *Jurnal Keamanan Maritim*, 8(2), 123-135.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Los Angeles: SAGE Publications.
- Mongabay. (2024). Konflik Laut Natuna Utara: Bakamla RI Berhasil Usir Coast Guard China. *Mongabay Indonesia*.
- Simorangkir, A. (2024). Perspektif Indonesia terhadap Nota Kesepahaman Maritim dengan China. *Jurnal Hubungan Internasional*, 12(4), 451-468.